



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TANAH LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penjabaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 serta penertiban Administrasi Keuangan Daerah dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Penanggung Jawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Anggota Pelaksana/ Teknis Kegiatan pada Bappeda Kabupaten Tanah Laut.
 - c. Bahwa untuk keperluan dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Tanah Laut, dimana pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diserahi tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b konsideran ini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 05);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 114);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 119).

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Menetapkan susunan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Bappeda Tanah Laut sesuai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pelaihari

Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19731128 199803 1 008

Lampiran Keputusan Kepala Bappeda Kab.
Tanah Laut
Nomor 05 Tahun 2024
Tanggal 02 Januari 2024

NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
1.1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1	Kepala Sub Bagian Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD
1.3		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.3.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atributnya
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
1.4		Administrasi Umum Perangkat Daerah

NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1.4.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyediaan Bahan/Material
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
1.5		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1.6		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6.1	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

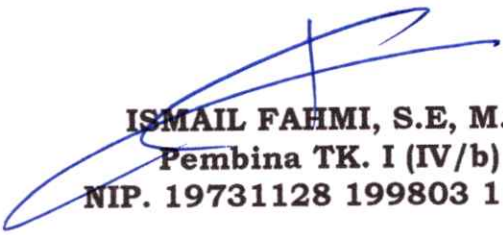
NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
2.1		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
2.1.1	Kepala Bidang Perencanaan Makro	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
2.2		Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.2.1	Kepala Bidang Perencanaan Makro	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2.3		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
2.3.1	Kepala Bidang Perencanaan Makro	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah

NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
3.		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.1		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3.1.1	Kepala Bidang Sosial dan Budaya	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
3.2		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
3.2.1	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD

NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA
3.3		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
3.3.1	Perencana Muda pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

NO.	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan
4.		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4.1		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
4.1.1	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi
		Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
4.2		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
4.2.1	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
4.3		Pengembangan Inovasi dan Teknologi
4.2.1	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil- Hasil Kelitbangan
		Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TANAH LAUT



ISMAIL FAHMI, S.E, M.T
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19731128 199803 1 008